



RENCANA KERJA

TAHUN 2026

STASIUN PPMHKP BANDUNG



KATA PENGANTAR

Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bandung (Stasiun PPMHKP Bandung) sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) merupakan bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang juga memiliki kewajiban untuk mencapai sasaran pembangunan di sektor Kelautan dan Perikanan.

Dalam upaya mewujudkan Visi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yaitu “Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu yang terdepan untuk memastikan keamanan, kualitas, keberlanjutan dan daya saing hasil kelautan dan perikanan, dalam rangka mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumberdaya kelautan perikanan yang berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, maka Stasiun PPMHKP Bandung menetapkan misi yaitu :

1. Pelayanan sertifikasi mutu produksi primer (CPIB, CBIB, CPIB Kapal, CPPIB, CPOIB, CDOIB), sertifikasi mutu pasca panen (SKP, HACCP, SPDI), dan Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP), serta pengujian laboratorium dan inspeksi secara profesional berbasis penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC17025:2017, SNI dan ISO/IEC 17020:2012 secara konsisten.
2. Meningkatkan produk kelautan dan perikanan yang berdaya-saing melalui inspeksi, sertifikasi, surveilen, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring (penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan).
3. Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional.

4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Stasiun PPMHKP Bandung Tahun 2026, merupakan gambaran kegiatan dalam mencapai tujuan / sasaran strategisnya di tahun 2026. Sebagai upaya yang dilakukan oleh Stasiun PPMHKP Bandung untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran pembangunan tersebut diantaranya dengan menyusun dokumen perencanaan dalam jangka menengah (Renstra) yang diimplementasikan kedalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan.

Penyusunan RKT 2026 ini sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kegiatan yang akan dilakukan oleh Stasiun PPMHKP Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi institusi sepanjang tahun 2026. RKT ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengambilan kebijakan dan sebagai bahan monitoring dan evaluasi kegiatan Stasiun PPMHKP Bandung di tahun kedepannya.

Demikian RKT Stasiun PPMHKP Bandung Tahun 2026 disusun supaya dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan. Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan RKT ini pada waktu yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan RKT ini.

Bandung, 19 Januari 2026
Pit. Kepala Stasiun PPMHKP Bandung



Isep Wahyudin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	5
Pendahuluan	6
Latar Belakang.....	6
Tugas dan Peran Organisasi.....	6
Tujuan.....	8
Manfaat.....	9
Sasaran	9
Rencana Kinerja Tahunan	10
Rencana Strategis, Visi dan Misi	10
Arah Kebijakan	13
Sasaran Strategis BPPMHKP dan Indikator Kinerja	13
Penutup	22

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Kinerja Stasiun PPMHKP Bandung TA 2025.....	16
Tabel 2. Indikator Kinerja Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan TA. 2026	17
Tabel 3. Alokasi anggaran per kegiatan pada program Stasiun PPMHKP Bandung Tahun 2026	20

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap kementerian dan lembaga menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029 sebagai arah kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan selama lima tahun.

Renstra Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran Renstra KKP sesuai tugas dan fungsi BPPMHKP dalam penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan. Renstra tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan kelautan dan perikanan serta visi pembangunan nasional Tahun 2025–2029.

Selanjutnya, Renstra KKP dan Renstra BPPMHKP dijabarkan ke dalam dokumen perencanaan yang lebih operasional pada setiap unit kerja, termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPMHKP. Sebagai salah satu UPT BPPMHKP, Stasiun PPMHKP Bandung menyusun dokumen perencanaan tahunan yang memuat sasaran, target, program, kegiatan, dan kebutuhan pendanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Stasiun PPMHKP Bandung Tahun 2025–2029, disusun Rencana Kerja (Renja) Stasiun PPMHKP Bandung Tahun 2026. Dokumen Renja ini disusun untuk memastikan keterpaduan, sinkronisasi, dan kesinambungan perencanaan pembangunan, serta menjaga keselarasan dengan RPJMN Tahun 2025–2029, Renstra KKP Tahun 2025–2029, dan Renstra BPPMHKP Tahun 2025–2029 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan kelautan dan perikanan.

2. Tugas dan Peran Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, pemerintah melakukan penataan organisasi kementerian guna mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses sehingga mampu mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Penataan tersebut mencakup penguatan kelembagaan, tugas, dan fungsi organisasi dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Sebagai dasar hukum kelembagaan Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah terjadi beberapa perubahan organisasi yang menyesuaikan dinamika kebutuhan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Melalui Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, fungsi karantina ikan dialihkan kepada Badan Karantina Indonesia, sedangkan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan tetap berada di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui pembentukan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP). Selanjutnya, dasar hukum kelembagaan KKP yang berlaku saat ini adalah Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025.

Sebagai unit organisasi yang memiliki mandat dalam penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan, BPPMHKP berperan strategis dalam menjamin mutu, keamanan pangan, dan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan pada seluruh rantai pasok. Peran tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan inspeksi, sertifikasi, surveilans, pengujian laboratorium, monitoring, serta pembinaan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Meningkatnya aktivitas perdagangan dan distribusi produk kelautan dan perikanan, baik untuk pasar domestik maupun ekspor, menuntut tersedianya sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang andal dan diakui. Dalam hal ini, BPPMHKP berperan sebagai otoritas kompeten yang memastikan pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan sesuai standar nasional dan internasional sehingga dapat meningkatkan daya saing dan

keberterimaan produk Indonesia di pasar global.

Peran tersebut diperkuat dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi UPT BPPMHKP di seluruh Indonesia.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP, Stasiun PPMHKP Bandung mempunyai peran penting dalam pelaksanaan layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya. Pelaksanaan tugas tersebut meliputi kegiatan inspeksi, sertifikasi, surveilans, pengujian laboratorium, monitoring mutu dan keamanan hasil perikanan, serta pelayanan publik yang mendukung penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Dalam mendukung program pembangunan kelautan dan perikanan melalui pendekatan ekonomi biru, Stasiun PPMHKP Bandung terus berupaya meningkatkan efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan, memperkuat sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang terpercaya, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan guna mendukung peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan Indonesia dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan..

a. Tujuan

Tujuan disusun Rencana Kerja Tahunan Stasiun PPMHKP Bandung Tahun 2026 adalah:

1. Sebagai acuan dalam penyusunan rencana strategis, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program/kegiatan pada tahun 2026.
2. Memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Stasiun PPMHKP Bandung pada tahun 2026.

b. Manfaat

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 merupakan penjabaran dan mengacu dari RPJMN 2025 – 2029 dan Rencana Strategis Kementerian Kelautan

dan Perikanan 2025 – 2029. RKT adalah upaya untuk menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan Stasiun PPMHKP Bandung dalam kurun waktu 1 tahun kedepan yaitu sepanjang tahun 2026. Melalui RKT ini diharapkan dapat menjamin keselarasan kegiatan pada tahun 2026.

c. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Kinerja Tahunan Pembangunan Stasiun PPMHKP Bandung adalah tersedianya Rencana Kinerja Tahunan Stasiun PPMHKP Bandung Tahun Anggaran 2026 sebagai tindak lanjut dari RPJM Stasiun PPMHKP Bandung tahun 2025 - 2029 yang akan dijadikan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) BPPMHKP Tahun Anggaran 2026 serta memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai oleh Stasiun PPMHKP Bandung pada tahun 2026.

RENCANA KINERJA TAHUNAN

1. Rencana Strategis, Visi dan Misi

Pembangunan kelautan dan perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, ketahanan pangan, peningkatan daya saing produk, serta kesejahteraan masyarakat. Dalam mendukung pencapaian visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045, Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan arah pembangunan kelautan dan perikanan yang berfokus pada pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Sebagai bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) memiliki peran strategis dalam menjamin mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan melalui pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu yang terintegrasi. Peran tersebut diarahkan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan Indonesia, serta mendukung perlindungan kesehatan masyarakat.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, BPPMHKP menyelenggarakan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang meliputi pengelolaan sistem manajemen mutu laboratorium dan lembaga inspeksi, penguatan sistem ketertelusuran, pelaksanaan inspeksi dan sertifikasi, pengambilan dan pengujian contoh uji, surveilans, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Visi BPPMHKP ditetapkan sesuai dengan Visi KKP 2025-2029 yaitu untuk mendukung Visi Presiden dan wakil Presiden “Menyelenggarakan dan Melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38 Tahun 2023, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BPPMHKP menjalankan 4

(empat) Misi KKP dalam Renstra 2025 – 2029, yaitu:

1. Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikasi, surveilans, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring.
2. Meningkatkan penerapan praktik yang baik di setiap rantai pasok dan kepatuhan terhadap pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan.
3. Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025 – 2029, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPMHKP bertanggung-jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan,
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan,
3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integrative,
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di BPPMHKP.

Sesuai dengan Permen KP Nomor 25/permen-kp/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa pengembangan sistem pengendalian mutu serta pengawasan keamanan hayati ikan merupakan salah satu kebijakan pokok dalam membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Langkah operasional kebijakan tersebut diselenggarakan melalui :

- a) Pengendalian dan pengawasan mutu produksi primer dan pasca panen,
- b) Pengawasan mutu domestik (pelabuhan perikanan, pasar tradisional dan pasar modern)
- c) Peningkatan kerjasama dan penyetaraan standar dengan tujuan ekspor
- d) Peningkatan kapasitas SDM pengendalian mutu, prasarana dan sarana laboratorium penguji dan lembaga inspeksi
- e) Perumusan dan penetapan standar, regulasi teknis yang harmonis dengan persyaratan mutu (domestik, impor dan ekspor).

Hasil kelautan dan perikanan merupakan seluruh produk yang berasal dari kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang diperuntukkan bagi konsumsi, pengolahan, maupun perdagangan. Dalam rangka meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan Indonesia, hasil kelautan dan perikanan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan pangan, dan ketertelusuran sesuai standar nasional maupun internasional.

Hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman merupakan produk yang memenuhi persyaratan teknis sesuai standar yang berlaku, bebas dari cemaran biologis, kimia, dan fisik yang dapat membahayakan kesehatan manusia, serta diproduksi, ditangani, diolah, disimpan, dan didistribusikan sesuai prinsip sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Produk yang terpercaya adalah produk yang telah melalui proses pengendalian dan pengawasan mutu sehingga memperoleh pengakuan dan keberterimaan di pasar domestik maupun internasional.

Sesuai tugas dan fungsi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), penyelenggaraan sistem jaminan mutu dan

keamanan hasil kelautan dan perikanan diarahkan untuk mewujudkan sistem pengendalian dan pengawasan mutu yang efektif, andal, dan selaras dengan standar nasional maupun internasional. Melalui pelaksanaan inspeksi, sertifikasi, surveilans, monitoring, pengujian laboratorium, dan penguatan sistem ketertelusuran, BPPMHKP berupaya meningkatkan daya saing dan keberterimaan produk kelautan dan perikanan Indonesia di pasar global.

Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi pembangunan BPPMHKP disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan nasional, serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, dinamika perdagangan internasional, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik. Arah kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, meningkatkan kepatuhan terhadap standar, memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing produk, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi Stasiun PPMHKP Bandung Tahun 2026 memuat langkah-langkah strategis yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan prioritas untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, khususnya di bidang pengendalian dan pengawasan mutu serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Program dan kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan dan BPPMHKP sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2025–2029.

Seiring dengan perkembangan kebijakan nasional, komitmen kerja sama bilateral, regional, dan multilateral di bidang perdagangan internasional, serta ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), ruang lingkup penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan semakin diperkuat guna menjamin mutu, keamanan pangan, ketertelusuran, dan daya saing produk kelautan dan perikanan Indonesia baik di

pasar domestik maupun internasional.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan diarahkan pada:

1. Pengelolaan sistem manajemen mutu laboratorium dan lembaga inspeksi dibidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
2. Penguatan sistem ketertelusuran (traceability) hasil kelautan dan perikanan untuk mendukung jaminan mutu, keamanan pangan, dan peningkatan akses pasar;
3. Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, pengambilan contoh uji, penerbitan sertifikat, serta surveilans terhadap penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan melalui kegiatan monitoring, pengujian laboratorium, serta pengendalian residu, cemaran, dan bahaya pangan lainnya yang berpotensi memengaruhi keamanan produk perikanan;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan;
6. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia, kapasitas laboratorium, serta penerapan metode pengujian yang terstandar guna mendukung keandalan hasil pengujian dan efektivitas pengawasan mutu;
7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel melalui peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian internal, manajemen risiko, reformasi birokrasi, dan pelayanan publik.

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, strategi Stasiun PPMHKP Bandung Tahun 2026 dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan, yaitu: (1) terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan; (2) terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar; dan (3) tata kelola

pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Bandung.

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja

Dengan mengacu pada visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan Tahun 2025–2029, Stasiun PPMHKP Bandung menetapkan sasaran kegiatan yang menggambarkan kondisi kinerja (outcome) yang ingin dicapai dalam rangka mendukung pembangunan sistem penjaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Sasaran kegiatan tersebut merupakan hasil yang akan dicapai organisasi dalam jangka waktu tertentu melalui pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Stasiun PPMHKP Bandung.

Sasaran kegiatan dirumuskan secara terukur dengan memperhatikan prinsip spesifik, relevan, dapat dicapai, berorientasi hasil, dan memiliki batas waktu yang jelas. Selain itu, sasaran kegiatan disusun secara konsisten, rasional, menantang, serta mampu mencerminkan peningkatan kinerja organisasi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan kelautan dan perikanan.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) merupakan bagian dari Kerangka Akuntabilitas Kinerja Organisasi yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Indikator kinerja tersebut menjadi tolok ukur pencapaian sasaran kegiatan di bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan, pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar, serta penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Sehubungan dengan hal tersebut, Stasiun PPMHKP Bandung telah menetapkan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 sebagai dasar pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja organisasi. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Stasiun PPMHKP Bandung Tahun 2025–2029 sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 1. Indikator Kinerja Stasiun PPMHKP Bandung TA 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
				2025
SK1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	70
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	70
		3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	99
SK3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	100
		5	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (Indeks)	87
		6	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (%)	85
		7	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung (Nilai)	88

Sedangkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Stasiun PPMHKP Bandung Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Indikator Kinerja Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung (%)	72
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung (%)	72
		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung (Nilai)	71
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung (%)	71
SK.3	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Bandung	5.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung (Indeks)	82,5
		6.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung (Nilai)	77
		7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung (Nilai)	86,2
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung (Persen)	86
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung (Nilai)	92,1
		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung (Nilai)	71,75
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung (%)	77
		12.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung (Indeks)	3.5

Dalam mewujudkan target indikator kinerja utama tersebut maka akan dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja pusat dan UPT. Adapun kegiatan dalam program pengembangan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sebagai berikut:

1. Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
2. Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar
3. Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Bandung

Kegiatan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan dilaksanakan dalam rangka memastikan terpenuhinya persyaratan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada seluruh rantai produksi, mulai dari tahap budidaya, penangkapan, penanganan, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran. Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, serta mendukung perlindungan konsumen dan peningkatan daya saing produk perikanan Indonesia.

Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui pembinaan, monitoring, verifikasi, surveilans, sertifikasi, pengujian laboratorium, serta pengawasan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai ketentuan nasional maupun internasional. Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin konsistensi penerapan standar mutu dan keamanan hasil perikanan sehingga mampu memenuhi persyaratan pasar domestik maupun ekspor.

Peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan menjadi salah satu fokus utama pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan melalui penerapan standar yang terintegrasi dan berkelanjutan guna meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produk perikanan Indonesia. Produk yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan akan meningkatkan akses pasar serta

meminimalkan risiko penolakan oleh negara tujuan ekspor.

Dalam mendukung sistem jaminan mutu yang efektif, pengawasan mutu dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan melalui kegiatan pemantauan, pengambilan sampel, pengujian laboratorium, serta pengendalian residu dan cemaran pada produk perikanan. Isu strategis seperti residu antibiotik pada komoditas budidaya, cemaran logam berat, histamin pada ikan, maupun bahan berbahaya lainnya menjadi perhatian utama dalam upaya menjaga mutu dan keamanan hasil perikanan Indonesia.

Selain itu, penerapan prinsip **ketertelusuran (*traceability*)** terus diperkuat untuk memenuhi tuntutan pasar global dan persyaratan negara tujuan ekspor. Sistem ketertelusuran memungkinkan produk perikanan ditelusuri sejak tahap produksi, penanganan, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran sehingga meningkatkan jaminan mutu, keamanan, dan kepercayaan konsumen.

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program, Stasiun PPMHKP Bandung juga melaksanakan penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pengelolaan sumber daya, pengendalian internal, manajemen risiko, serta penguatan reformasi birokrasi. Dengan tata kelola yang baik, pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dapat berjalan optimal dan berorientasi pada hasil.

Rencana Kerja Stasiun PPMHKP Bandung Tahun 2026 disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk mendukung tercapainya sasaran kegiatan, yaitu terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan, terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Bandung.

Alokasi anggaran Stasiun PPMHKP Bandung Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 4.278.084.000,- yang digunakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja

kegiatan pada masing-masing sasaran kegiatan. Pemanfaatan anggaran diarahkan pada pelaksanaan kegiatan prioritas yang memberikan kontribusi langsung terhadap

peningkatan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target kinerja, Stasiun PPMHKP Bandung menerapkan kebijakan pengelolaan anggaran melalui penguatan perencanaan berbasis kinerja, penajaman prioritas kegiatan, optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjamin penggunaan anggaran yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mendukung pencapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Rincian alokasi anggaran berdasarkan program dan kegiatan pada Stasiun PPMHKP Bandung Tahun Anggaran 2026 disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Alokasi anggaran per kegiatan pada program Stasiun PPMHKP Bandung Tahun 2026

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	218.600.000
2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	56.500.000
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan	4.002.984.000
Total Anggaran Stasiun PPMHKP Bandung Tahun 2026		4.278.084.000

PENUTUP

Rencana kerja Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan pada TA. 2026 ditujukan dalam rangka mewujudkan sasaran kegiatan Stasiun PPMHKP Bandung antara lain :

1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan.
2. Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar.
3. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Bandung.

Total rencana alokasi anggaran per kegiatan Stasiun PPMHKP Bandung pada tahun 2025 sebesar **Rp. 4.278.084.000,-**. Alokasi anggaran tersebut terdiri dari :

1. Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan Sebesar **Rp. 218.600.000,-**
2. Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar Sebesar **Rp. 56.500.000,-**
3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan Sebesar **Rp. 4.002.984.000,-**.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAR www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN BANDUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Isep Wahyudin**
Jabatan : **Plt. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bandung**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : **Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2026

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik
Ishartini

Pihak Pertama
Plt. Kepala Stasiun Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan Bandung



Ditandatangani
Secara Elektronik
Isep Wahyudin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN BANDUNG

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung (%)	72
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung (%)	72
		3.	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung (Nilai)	71
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung (%)	71
SK.3	Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Stasiun PPMHKP Bandung	5.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung (Indeks)	82,5
		6.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung (Nilai)	77
		7.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung (Nilai)	86,2
		8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung (Persen)	86
		9.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung (Nilai)	92,1
		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung (Nilai)	71,75
		11.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung (%)	77
		12.	Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Bandung (Indeks)	3.5

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	218.600.000
2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	56.500.000
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan	4.002.984.000
Total Anggaran Stasiun PPMHKP Bandung Tahun 2026		4.278.084.000

Jakarta, 5 Januari 2026

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Plt. Kepala Stasiun Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan Bandung



Ditandatangani
Secara Elektronik

Isep Wahyudin

